

RELASI ISLAM DAN NASIONALISME DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA

Suhaimi

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: haessuhaimi@yahoo.com

Abstract

In line with the times demand, nationalism changes as a dynamic concept of dialectics proceeds with changes in social, political, and economic in the country and global levels. Based on a review of historical chronology, this paper analyzed descriptively the relationship between Islam and nationalism in Indonesia.

Since the early growth of nationalism and the Dutch colonization period in Indonesia, Islam became the spirit of sacrifice of lives and property of the Indonesian people's fighting to get independence and on the Japanese colonial period and the early days of independence, Islam through the Muslim leaders function as a base of departure and developer awareness of nationalism, patriotism and unity to defend the independence. Despite the authoritarian New Order ruler cope with Islam through the establishment of the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI), but awareness of national Muslim leaders to build Indonesia managed to push governance reforms. And in this era of reform, the spirit of nationalism and the spirit of sacrifice of the Indonesian leaders increasingly eroded by corruption.

Key words: *proto-nationalism, political nationalism, cultural nationalism.*

Abstrak

Sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, paham nasionalisme atau kebangsaan mengalami perubahan sebagai konsep yang dinamis dari hasil dialektika dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri maupun perubahan-perubahan pada tingkat global. Berdasarkan tinjauan historis kronologis, tulisan ini menganalisis secara deskriptif relasi antara Islam dan paham nasionalisme bangsa Indonesia.

Sejak masa awal pertumbuhan nasionalisme dan saat penjajahan Belanda di Indonesia, Islam menjadi ruh semangat berkorban jiwa dan harta rakyat Indonesia berperang merebut kemerdekaan dan pada masa penjajahan Jepang serta masa awal kemerdekaan, Islam melalui para pemimpin umat Islam berhasil menjalankan fungsinya sebagai pangkal tolak dan pengembang kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, bersatu mempertabankan dan mengisi

kemerdekaan. Meskipun penguasa Orde Baru yang otoriter mengkooptasi Islam melalui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), tapi kesadaran kebangsaan pemimpin umat Islam membangun Indonesia berhasil mendorong reformasi pemerintahan. Dan pada era reformasi ini, jiwa nasionalisme dan semangat berkorban para pemimpin umat semakin terkikis habis digerogeti masalah korupsi.

A. Pendahuluan

Dalam proses komunikasi sosial antar pejabat publik dan warga bangsa Indonesia pada era reformasi saat ini, jiwa nasionalisme dalam arti semangat mengabdikan kepada rakyat atau berkorban untuk rakyat dan kecintaan untuk membangun suatu bangsa tanpa pamrih dari para pejabat publik di Indonesia semakin terkikis habis dan menjadi barang langka.

Ketika faktor integritas menjadi acuan bangsa-bangsa lain untuk maju, di Indonesia sekarang ini justru sebaliknya, korupsi beregenerasi terus menerus secara masif. Menurut catatan Kompas, sepanjang tahun 2004-2011 telah terjadi 1.408 kasus korupsi yang telah merampok uang rakyat Indonesia sebesar Rp. 39,3 triliun (Kompas, 5, 12, 2012). Banyak politisi dan pejabat publik, dari bupati, politisi, sampai mantan menteri, masuk penjara karena korupsi. Mereka antara lain bernama Burhanuddin, Nazaruddin bahkan Abdullah yang menunjukkan bahwa mereka beragama Islam.

Ke mana jiwa nasionalisme para pemimpin Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam saat ini? Kepemimpinan pejabat publik di Indonesia kini tidak lagi menggetarkan hati rakyat dan mampu merebut jiwa mereka. Dewasa ini, pada proses komunikasi sosial yang berlangsung dalam masyarakat, tampak jelas bahwa pada satu pihak para pemimpin baik di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai komunikator mengalami erosi wibawa karena perilaku korupsi, di lain pihak kemajuan teknologi media massa dan media sosial semakin meningkatkan daya kritik pihak warga masyarakat sebagai khalayak, akibatnya terjadi jarak yang semakin lebar antar peserta komunikasi.

Tulisan ini lebih lanjut akan menguraikan bagaimana relasi Islam dan nasionalisme dalam sejarah komunikasi sosial bangsa Indonesia berdasarkan tinjauan historis.

B. Fase Awal Nasionalisme di Indonesia

Sejarah nasionalisme di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya India warisan Hindu Jawa dan nasionalisme India kontemporer. Wacana nasionalisme Indonesia banyak diwarnai oleh kebanggaan sejarah akan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya dan dipengaruhi oleh simbol-simbol pesan komunikasi Hindu-Jawa.

Kitab "Negarakertagama" menceritakan bahwa kedaulatan Majapahit ditegakkan oleh Raja Dyah Hayam Wuruk Sri Rajasanegara yang kuat, saat itu rakyat hidup sejahtera, megah dan damai serta harmonis. Kesatuan Nusantara akan dipertahankan meskipun harus menggunakan kekuatan senjata. Raja mencoba untuk menciptakan sinkretisme antara Syiwa, Budha dan Brahma, agama Hindu dan Budha hidup bersama-sama tanpa ada pertentangan.¹

George Coedes, seorang arkeolog Prancis mencatat, seperti dikutip oleh Taufik Abdullah, tentang sejarah Asia Tenggara Kuno dalam *Les Etats Hindouïé d'Indo-Chine et d'Indonesie* (1964) bahwa banyak kerajaan-kerajaan di kepulauan Indonesia dan di wilayah-wilayah yang disebut *mainland Southeast Asia* (daratan Asia Tenggara) yang telah dipengaruhi Hindu (atau lebih tepat, barangkali, India).² Lebih jauh lagi, Harry J Benda membagi sejarah Asia Tenggara atas tiga wilayah kultural: pertama sebagai *Indianized Southeast Asia*, Asia Tenggara yang telah di-India-kan, kedua *Sinicized Southeast Asia*, yaitu yang telah "di-Cina-kan" seperti wilayah orang Vietnam, kecuali Champa kerajaan yang "*Indianized*", dan dihancurkan dalam proses gerak maju orang Vietnam ke Selatan. Dan, ketiga, *Hispanized Southeast Asia*, yang di-Spanyol-kan, yaitu Filipina.³

Indonesia berdasarkan wilayahnya merupakan kelanjutan dari wilayah kekuasaan penjajahan Belanda yang dikenal sebagai "Hindia Belanda" atau "Hindia Timur Belanda" (*Dutch East Indies*), tapi sebagai suatu bangsa, Indonesia tidak dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, melainkan justru oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan itu bersenjatakan Islam sebagai dasar nasionalisme dan patriotisme.⁴

Sejak akhir abad ke-19, di Hindia Belanda berkembang penerbitan yang awalnya dikendalikan oleh orang-orang Tionghoa peranakan dan Indo-Eropa, kemudian melibatkan para priyayi pemerintah dan orang partikelir. Dengan cepat pada awal abad ke-20, mereka sudah mulai menjalankan penerbitannya sendiri di mana mereka mulai mengungkapkan dan membaca adanya "komunitas" yang lebih luas dari ikatan-ikatan yang selama ini mereka kenal.⁵

Periode akhir tahun 1970-an dan 1980-an beberapa ilmuwan mendominasi pembahasan nasionalisme. Gellner mendefinisikan kata

“*nation*” sebagai suatu bentuk kesadaran berbagi “kebudayaan” dalam berbagai bentuknya. Menurutnya nasionalisme adalah “semacam patriotisme khusus yang menjadi penting ketika kondisi sosial tertentu seperti terlihat pada dunia modern dan di manapun tempat lainnya”. Contohnya saat ini adalah “chauvinisme kebudayaan”.⁶

Hal itu serupa dengan Anthony Smith yang memberikan semacam “definisi kerja” tentang sebuah “*nation*” atau bangsa yang modern adalah “suatu nama bagi serumpun populasi manusia yang berbagi mitos dan ingatan sejarah, suatu kebudayaan massa, suatu tanah kelahiran, persatuan ekonomi dan berbagi persamaan hak dan kewajiban antar sesama mereka”.

Benedict Anderson mencermati keterkaitan faktor kesamaan bahasa komunikasi dan pengalaman bersama yang ditimbulkan oleh karya sastra yang menghasilkan suatu “komunitas imajiner” yang didasari oleh perasaan senasib dan sepenanggungan di Eropa abad pertengahan. Misalnya di Ukraina, pembentukan Universitas Kharkov pada tahun 1804 menyebabkan terjadinya “ledakan kesusasteraan” Ukraina yang dimotori oleh sastrawan Taras Shevchenko, yang kemudian disusul dengan pembentukan sebuah organisasi nasionalis Ukraina di Kiev pada tahun 1846.⁷ Di samping itu agama-agama besar, dalam pandangan Anderson seperti dikutip oleh Fachry Ali, telah berjasa memberikan jawaban-jawaban pelik terhadap persoalan kemanusiaan yang tak mampu ditawarkan oleh ideologi-ideologi atau penjelasan-penjelasan rasional.⁸ Bahkan keberadaan agama-agama besar telah pernah mengasuh, mempertemukan, “mempersatukan” umat manusia lintas etnis dan wilayah dalam sebuah kerangka berpikir standar dan dengan itu memberikan kenangan yang bertahan secara kolektif dalam diri manusia.

Apa pun alasannya, menurut catatan Connor, hari ini seperti telah terjadi dua dekade sebelumnya, *ethnic nationalism* telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas politik di negara-negara seperti Belgia, Burma [Myanmar], Ethiopia, Guyana, Nigeria, the Soviet Union, Sri Lanka, Yugoslavia dan Zimbabwe. “Nation-building” telah gagal memberi jawaban yang tepat tentang rintangan utama pembangunan politik⁹

Dalam, *The end of Ideology* (1960), Daniel Bell secara implisit menyatakan sesuatu kekeliruan yang cukup distortif bahwa riwayat “nasionalisme” yang dipahami sebagai suatu ideologi telah tamat, karena jelas “nasionalisme” tidak mati, ia memang surut dalam negara-negara maju. Menurut Hobsbawm dalam *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality* (1990), seperti dikutip Azra, nasionalisme kini memang tidak lagi menjadi kekuatan utama dalam

perkembangan historis. Ia tidak lagi menjadi program politik global sebagaimana pernah terjadi pada abad XIX dan XX. Namun, ini tidak berarti bahwa nasionalisme tidak begitu terkemuka dalam politik dunia sekarang ini, atau sudah sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Nasionalisme dapat menjadi satu faktor yang rumit atau katalis bagi perkembangan lain. Berdasarkan pengamatannya tentang konsep nasionalisme di Asia Tenggara, Azra menyatakan bahwa nasionalisme sesungguhnya merupakan konsep dinamis yang mengalami perubahan sebagai hasil dialektika, baik dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri maupun perubahan-perubahan pada tingkat global.¹⁰ Dalam kerangka itu, menurutnya terdapat tiga tahap perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, Pertama tahap “protonasionalisme” atau fase penyerapan gagasan nasionalisme yang diikuti pembentukan organisasi-organisasi, Kedua fase yang sarat dengan muatan politis ketimbang sosial dan kultural, nasionalisme di Indonesia fase ini bertujuan mencegah dengan cara apapun kembalinya kolonialisme dan imperialisme Eropa. Ketiga fase penekanan nasionalisme ekonomi dalam bentuk program modernisasi dan industrialisasi atau pembangunan.

Abad ke-7 M, menurut catatan I Tsing, seorang sarjana musafir Cina, Sumatera menjadi pulau terpenting di Nusantara, sebagai pusat peradaban Asia Tenggara. Saat itu Agama Budha mulai datang ke Sumatera dan pengaruh Budhisme Mahayana sudah muncul yang kemudian melahirkan kerajaan Sriwijaya. Dia pun mencatat pada tahun 671 M, di Palembang ada pasar besar dengan para pedagang yang datang dari Tamil, Persia, Arabia, Yunani, Kamboja, Siam, Cina dan Birma. Ribuan kapal berlabuh di sana dan ada Universitas Sriwijaya yang menjadi tempat belajar ribuan pendeta dari seluruh dunia. Jadi Palembang saat itu sebagai ibu kota Sriwijaya merupakan kota metropolitan yang kosmopolit.¹¹ Masa itu terjadi sekitar masa kerasulan Nabi Muhammad saw dan kekhalifan Abu Bakr, ‘Uthman dan ‘Ali.

Sriwijaya yang berkuasa atas Selat Malaka berperan sebagai penjaga lalulintas maritim dan perdagangan internasional yang pengaruhnya secara politik dan komersial mencapai Hainan dan Taiwan. Pada awal abad ke-11, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya, sekitar satu abad setelah kekhalifan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun pun sedang mencapai puncak kebesarannya, maka mungkin sekali Sriwijaya adalah salah satu dari rekanan dagang kaum ‘Abasi di Timur.

Pada akhir abad ke-12, para pedagang Muslim Arab dan Persia menghadapi kesulitan berat akibat para penguasa Sriwijaya

menerapkan kebijakan perdagangan monopolistik, maka mereka mulai mengalihkan kegiatan dagang dan dakwah Islam ke tempat-tempat lain di Nusantara. Hasilnya bukan saja hubungan dagang yang berkembang, tapi juga hubungan religio-kultural dan politik diperkuat.

Penyebar pertama Islam di Nusantara adalah para pedagang muslim yang berdakwah Islam bersamaan dengan melakukan perdagangan di wilayah ini, maka nucleus komunitas-komunitas muslim pun terbentuk, yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Sebagian mereka kawin dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkannya atau keturunan diri mereka mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam.¹²

Peranan penting para pedagang dalam dakwah Islam di kawasan Asia Tenggara terus berlanjut, sehingga kawasan itu menyatu dalam pola budaya *hemispheric* Islam, saat itu Islam meliputi seluruh belahan bumi yang setara dengan dimensi “global” sekarang ini. Ketika itulah bangsa-bangsa Eropa yang didahului oleh Spanyol dan Portugis dari Semenanjung Iberia datang ke Nusantara.¹³ Mereka mengembara ke seluruh muka bumi setelah berhasil dengan gerakan *reconquista* (penaklukan kembali orang-orang Iberia atas kaum muslim) untuk menemukan jalur perdagangan sendiri langsung ke India dan Timur jauh (khususnya Cina dan Maluku), sehingga tidak tergantung kepada para pedagang Muslim Arab, Persi, India dan Cina.

Keserakahan bangsa Portugis dan Spanyol yang menjajah bangsa-bangsa di Asia Tenggara hanya terhambat oleh perlawanan sengit dari masyarakat dalam lingkungan peradaban *hemispheric* Islam yang sudah mapan. Sejak awal proses islamisasi, khususnya sejak abad ke-13 ke atas, peranan Islam dalam membangun protonasionalisme di Indonesia sangat penting. Islam telah datang menyatakan kesetiaan mayoritas penduduk di Indonesia dalam sistem sosio-politik, kultural, maupun ekonomi. Dari abad ke-14 mobilitas ulama di dunia Melayu dan materi kitab yang mereka produksi menjadi faktor penting bagi tersebarnya karya-karya-Islam Melayu di seluruh Nusantara. Hal ini membangkitkan perasaan persatuan di antara pembaca yang kemudian menjadi cikal bakal persatuan Indonesia. Pada abad ke-14 inilah Samudra Pasai menjadi pusat aktivitas Islam dan pertemuan ulama di Nusantara. Raja Pasai Maulana Malik al-Zahir (1326-1371), sangat gemar belajar. Dia dikelilingi oleh ulama dari berbagai bangsa, khususnya ulama Persia. Dia mengangkat Qadi Syarif Amir Sayyid dari Shiraz dan Taj al-Din dari Isfahan sebagai penasihat sultan dan anaknya.

Kendati Islam tidak menciptakan kesatuan politik, tapi sejak abad ke-15, Islam mulai menyediakan pondasi bagi manifestasi integrasi budaya. Arus aktivitas pedagang dan pengembaraan ulama serta penggunaan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi merupakan tulang punggung bagi integrasi budaya itu. Kolonialisme yang datang kemudian bahkan membantu untuk mempertahankan pondasi itu.¹⁴

Ketika Dinasti Uthmani berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, supremasi politik dan kultural Rum (Turki Utsmani) disebarkan ke berbagai Dunia Muslim, termasuk Nusantara dan Turki Uthmani menutup pintu perdagangan (antara lain dalam rempah-rempah) bagi bangsa-bangsa Barat yang sangat membutuhkannya.¹⁵ Oleh karena itu saat abad ke-16 sampai paruh kedua abad ke-17 terjadi perang memperebutkan kekuasaan di Kawasan Lautan India antara Portugis melawan Dinasti Uthmani, kaum Muslim Nusantara banyak berinisiatif menjalin hubungan politik dan keagamaan serta perdagangan dengan Dinasti Uthmani

Di samping itu, sejak Belanda datang ditandai oleh hadirnya maskapai perdagangan Belanda *Verrenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) bulan Maret 1602, ekspansi kekuasaan Belanda terancam oleh perlawanan Islam lokal yang dipimpin oleh penguasa Indonesia, bangsawan yang masuk Islam dan ulama fanatik di pedesaan. Dalam bidang sosial-politik mereka dipimpin para sultan, sedang dalam bidang sosial-keagamaan mereka dipimpin para ulama. Dengan demikian aparat kolonial Belanda tidak pernah dengan mudah berhubungan dengan Islam Indonesia. Dalam hal ini Ahmad Syafii Maarif mengutip ilustrasi yang ditulis oleh Harry J. Benda dalam bukunya *Continuity and Change in Southeast Asia*, bahwa “Sering sekali konsolidasi ekspansi kekuasaan mereka diancam oleh pemberontakan-pemberontakan lokal yang diilhami Islam, baik yang dipimpin oleh penguasa-penguasa Indonesia yang telah mengikuti iman Nabi, atau, pada tingkat desa, oleh ulama fanatik”.¹⁶ Bahkan Abd al-Shamad al-Palimbani (1740-1789), ulama besar asal Palembang mengirim surat-surat dari Mekah kepada penguasa Mataram untuk melakukan jihad melawan Belanda. Di samping itu al-Palimbani terkenal dengan karyanya *Nashibah Al-Muslim wa Tadzkirah Al-Mu'minin fi Fadha'il Al-Jihad fi Sabil Allah wa Karamah al-Mujahidin fi Sabilillah*, dalam bahasa Arab yang menjelaskan wajib bagi kaum Muslim melancarkan perang suci melawan kaum kafir. Dia menutup karyanya dengan sebuah doa pendek yang akan membuat kebal orang-orang yang berjihad tak terkalahkan. Snaouck Hurgronje menyatakan karya Al-Palimbani itu merupakan sumber utama berbagai karya mengenai jihad dalam Perang Aceh yang panjang melawan Belanda,

seperti kumpulan tulisan yang dikenal sebagai Hikayat Prang Sabi yang berperan penting dalam menunjang semangat juang orang Aceh berperang melawan Belanda sepanjang tahun 1873 hingga awal abad ke-20. Azra mencatat bahwa Al-Palimbani adalah salah satu tokoh neo-sufisme yang secara radikal melakukan pembaruan tasawuf dari ajaran kepasifan dan penarikan diri kepada aktivisme pemenuhan kewajiban duniawi seperti jihad melawan bangsa kafir.¹⁷ Dengan demikian aktivitas ulama menjadi faktor formatif dalam pembentukan nasionalisme Indonesia karena merekalah yang menyediakan sarana untuk mengekspresikan kebencian rakyat terhadap pendudukan asing yang hegemonik. Islam telah menjadi sebagai dasar ikatan solidaritas dari komunitas-komunitas pemeluknya, sebelum cita-cita nasionalisme yang telah dirumuskan sebagai dasar keutuhan bangsa terwujud, maka Islam telah memberikan dasar cita kesatuan dan anti kolonialisme, dua hal yang merupakan landasan perkembangan nasionalisme.¹⁸

Di antara perang yang terkenal antara umat Islam dan kaum kolonialis Belanda ialah Perang Paderi (1821-1837), di Sumatera Barat, Perang Diponegoro (1825-1830) di Jawa Tengah, dan Perang Aceh sebagai perang terlama dan terkejam dari tahun 1872 sampai 1921. Berdasarkan fakta inilah, Ibrahim Alfian berpendapat bahwa mitos penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama 350 tahun harus ditolak karena tidak cukup alasan untuk itu. Sebab hal itu hanya berlaku atas sebagian kecil wilayah yang terbatas berada di daerah-daerah tertentu di pulau Jawa. Di daerah lain, seperti Aceh, kekuasaan Belanda misalnya hanyalah berlangsung dari tahun 1872 sampai tahun 1942.

Sampai dengan pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda masih terus abai terhadap pendidikan kaum pribumi dan menghindarkan diri dari campur tangan yang berlebihan terhadap urusan-urusan keagamaan kaum pribumi. Hal itu disebabkan antara lain keinginan untuk tetap mempertahankan perbedaan status superioritas Barat terhadap kaum pribumi dan kepentingan ekonomi.¹⁹ Pengetahuan dan pendidikan di Hindia masih serupa dengan pendidikan di kebanyakan sistem religio-politik tradisional di seluruh dunia yang cenderung disubordinasikan pada yang sakral. Agama menjadi dasar alasan, tujuan, dan isi dari pendidikan tradisional serta menjadi penyedia guru-guru dan tempat bagi proses belajar.

Akibat pengaruh politik kaum Liberal dalam berbagai persoalan tanah jajahan, maka terjadi perubahan sikap pemerintah kolonial terhadap pendidikan kaum pribumi di Hindia pada paruh kedua abad ke-19. Hal itu penting untuk mendukung ekonomi-politik industrialisasi dan birokrasi, meskipun akan mengancam superioritas

bangsa kolonial, karena itu pendidikan yang dibangun pemerintah kolonial didasarkan pada prinsip segregasi etnik dan hirarki status.²⁰

Untuk melayani kelompok status yang paling tinggi diadakan pendidikan dasar bergaya Eropa yang dikenal dengan *Europeesche Lagere School* (ELS) yang ditempuh selama tujuh tahun. Seiring dengan perubahan kebijakan kolonial sejak tahun 1864, sekolah ini terbuka bagi kalangan yang sangat terbatas kaum pribumi dan setelah 1891, ELS juga ditawarkan kepada orang kaya “yang memenuhi syarat”.²¹

Tahun 1899, CT Van Deventer menghasilkan tulisan yang terkenal berjudul “Hutang Budi” yang menjelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda sebagai akibat Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgia, telah diisi oleh dana yang diambil dari orang Hindia, karena itu sudah sepatutnya budi orang Hindia ini dibayarkan kembali. Dan pada bulan September 1901, Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina dalam pidato tahunannya berkata tentang suatu “kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk Hindia Belanda”. Sejak saat itu ditetapkan berlakunya orientasi baru dalam perlakuan kolonial terhadap Hindia yang dikenal sebagai “Politik Etis”. Pada tahun 1908, Van Deventer mengecam pemerintah kolonial dalam tulisannya pada majalah *De Gids*, bahwa sampai waktu terakhir, pemerintah kolonial tidak pernah memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumiputera. Kebidupan rakyat sangat sengsara, oleh karena itu “hutang budi” itu harus dibayar dalam bentuk peningkatan kesejahteraan melalui tiga sila sebagai semboyannya yaitu “irigasi, edukasi, dan emigrasi”.²²

Kebijakan politik etis berdampak juga perlakuan baru pemerintah kolonial Belanda terhadap Islam, terutama akibat pengaruh Christiaan Snouck Hurgronje yang ditunjuk sebagai seorang penasihat Kantor Urusan Pribumi dan Arab. Sehubungan dengan itu, dia merekomendasikan kerangka kerja baru kebijakan terhadap Islam yang disebut “splitsingstheorie” yang membagi Islam menjadi dua bagian: Pertama, Islam yang bersifat keagamaan dan Kedua, Islam yang bersifat politik. Pemerintah kolonial harus menghormati dimensi dunia kehidupan Muslim yang pertama, tapi tidak boleh menoleransi yang kedua.²³ Snouck berpendapat juga pentingnya menciptakan para elit Hindia baru yang bisa merawat garis-garis kebijakan “asosiasi” (*association policy*), maka dia merekomendasikan agar pemerintah kolonial mempromosikan organisasi pendidikan berskala luas di atas landasan nilai-nilai universal dan bersifat netral secara keagamaan sehingga bisa “mengemansipasi” elit baru dari keterikatan agamanya. Jadi “mengemansipasi” dalam konteks ini berarti menjauhkan elit baru dari

ajaran Islam. Dengan demikian, proses kelahiran kesadaran nasional Hindia akan dipandu melalui kerja sama dan arahan pihak Belanda, dan tidak diarahkan oleh gerakan Pan-Islamisme yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda secara politik.

Pemerintah kolonial tetap mempertahankan kebijakan diskriminatifnya dalam sistem pendidikan formal, maka selain sekolah ELS untuk orang Eropa, *Hollandsch Chineesche School* (HCS) didirikan untuk keturunan Cina, sedang bagi keturunan Arab disediakan *Hollandsch Arabische School* (HAS). Untuk kaum elit tradisional pribumi diselenggarakan *Hollandsch-Indlansche School* (HIS) yang merupakan kelanjutan “Sekolah (Pribumi) Kelas Satu” (*Eerste Klasse School*) Dan untuk rakyat umum cukup dengan “Sekolah Desa” atau “Sekolah Rakyat” (*Volksschool*) yang merupakan kelanjutan “Sekolah (Pribumi) Kelas Dua” (*Tweede Klasse School*).

Pemerintah kolonial menyediakan pendidikan dasar umum lanjutan, yaitu MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). Sekolah lanjutan atas terbagi antara pendidikan umum AMS (*Algemene Middelbare School*) dan pendidikan khusus dalam bidang keahlian tertentu seperti HBS (*Hogere Burgelijke School*), OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*) yang menghasilkan pegawai pemerintahan dalam negeri. Pada tingkat perguruan tinggi, disediakan beberapa jenis pendidikan keahlian, yaitu THS (*Technise Hoge School*) bidang teknologi di Bandung, bidang kedokteran GHS (*Geneeskundige Hoge School*) di Batavia dan bidang hukum, ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan politik yaitu RHS (*Rechts Hoge School*) di Jakarta Pusat. Bagi lulusan jenis Sekolah Rakyat, semua pintu pendidikan lanjutan tertutup, sedang pendidikan menengah dan tinggi semua dapat dimasuki hanya oleh anak-anak Eropa, Timur Asing dan Pribumi Priyayi. Lebih dari itu, para anggota masyarakat lingkungan pondok pesantren pimpinan para ulama, bukan saja hak mereka diingkari, bahkan mereka sendiri menyatakan pendidikan Belanda itu semuanya haram.²⁴

Para ulama pimpinan pondok pesantren menyikapi ajakan pemerintah kolonial untuk ikut serta dalam “peradaban modern” dengan sikap berdasarkan hadits, “Barangsiapa meniru suatu kaum, maka ia termasuk kaum itu” (*Man tasyabbaha bi qawmin fa huwa minhum*). Maka meniru “kaum” Belanda dengan, misalnya belajar ilmu pengetahuan modern (dan hurup Latin), memakai celana dan dasi, membuat yang bersangkutan termasuk “kaum” Belanda yang “kafir” itu. Sikap ini telah menimbulkan semacam “eskapisme dan pengunduran diri” dari sebagian ummat Islam dari daerah urban ke pedalaman. Di daerah Pedalaman mereka mendirikan kubu-kubu pendidikan baru melancarkan perlawanan kultural keagamaan

terhadap nilai-nilai dan gagasan yang bercorak asing.²⁵ Sikap ini disebabkan juga oleh perasaan anti Islam dari sebagian orang Eropa, sehingga Islam berfungsi sebagai senjata ideologis yang sangat kuat untuk melawan penjajah Barat. Kaum santri, para kiai, dan dunia pesantren berfungsi sebagai “*reservoir*” terpenting kesadaran kebangsaan dan patriotisme. Mereka merupakan tonggak-tonggak fondasi rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan dan di atas fondasi itu kelak ditegakkan nasionalisme dan patriotisme Indonesia modern.

Bibit-bibit nasionalisme modern di Indonesia juga muncul di kalangan penduduk pribumi yang mengikuti pendidikan “dokter Jawa” pada STOVIA (*School tot Opleiding voor Indlandse Artsen*) di Jakarta dan NIAS (*Nederlands Indise Artsen School*) Sekolah Dokter Hindia Belanda di Surabaya, sebagai “akibat tak sengaja” (*unintended consequence*) dari pendidikan modern hasil kebijakan “politik Etis” pemerintah kolonial Belanda,²⁶ berkat kepeloporan Dokter Wahidin Sudiro Husodo dan Dokter Sutomo sebagai intelektual yang mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908. BU kemudian dianggap sebagai pelopor kebangkitan nasional.²⁷ Pada masa selanjutnya, nasionalisme itu terus bergerak maju, melampaui batas-batas etnik dan berkembang menjadi nasionalisme Hindia. Hal ini bisa dilihat dari judul-judul terbitan berkala saat itu, seperti Hindia Bergerak, Sinar Hindia, Oetoesan Hindia, Persatoean Hindia, dan sebagainya.²⁸

Dalam perkembangannya kemudian pada tahun 1912, para pemimpin BU mencantumkan agenda “memajukan Islam” sebagai salah satu tujuan dalam perumusan programnya dan setahun sebelumnya BU menyambut hangat berdirinya SI, bahkan terjadi kepemimpinan dan keanggotaan rangkap antara anggota BU dan SI. Hal yang sama tercermin pula pada saat K.H.A. Dahlan dengan dorongan orang-orang BU pada tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah.²⁹

Islam di Indonesia secara historis telah melahirkan organisasi sosial ekonomi bercorak modern dengan nama SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi (1868-1956) di Solo pada tanggal 11 Nopember tahun 1911. Ketika SDI berganti nama menjadi SI pada tanggal 10 September 1912 dan dipimpin oleh Haji Oemar Said Tjokroaminoto (1882-1934), dia menjadikan Islam sebagai asas perjuangan dalam bentuk ideologi politik, maka SI juga telah membawa kebangkitan nasional yang bersifat kerakyatan.³⁰ Saat awal perkembangannya, SI beranggotakan para saudagar Islam kemudian menginjak dua tahun pertama para petani dan buruh masuk menjadi anggotanya dengan menjadikan Islam sebagai dasar organisasi, sehingga SI menjadi

bersifat populis dan memiliki identitas nasional yang sangat jelas. Tahun 1915 SI menyelenggarakan konggres di Surabaya, saat itu Haji Agus Salim (1884-1954) dan Haji Abdullah Ahmad dan K.H.A. Dahlan bergabung dengan SI. H. Agus Salim bersama Tjokroaminoto kemudian menjadi pemimpin terkemuka SI, sedangkan H. Abdullah Ahmad dan K.H.A. Dahlan dikenal Sebagai penasehat agama SI yang saat itu telah mempunyai lebih dari limapuluh cabang lokal. Hal ini menjadi ancaman kekuasaan kolonial Belanda, maka pengakuan pemerintah terhadap SI diberikan hanya untuk cabang-cabang lokal dan bukan untuk organisasi secara keseluruhan yang kemudian mendorong Tjokroaminoto dan pemimpin SI lainnya untuk membentuk Central Sarekat Islam (CSI) pada bulan Pebruari 1915 dan mendapat pengakuan resmi pada bulan Maret 1916.

Sedangkan BU lebih dari satu dasawarsa kemudian masih membatasi diri pada dasar kejawaan dengan dipimpin oleh anggota golongan tua. Anggota golongan muda BU seperti Dr. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman dan Sunardi kemudian pada tahun 1912 mendirikan Tri Koro Dharmo yang berkembang tahun 1919 menjadi Jong Java dan diikuti dengan berdirinya organisasi-organisasi daerah serupa yang pada tahun 1926 bergabung menjadi Jong Indonesia.

Dari anggota Jong Indonesia itulah kemudian tercatat seorang pemuda bernama Syamsurizal atas anjuran Haji Agus Salim dari pimpinan SI mendirikan *Jong Islamieten Bond* (JIB) dengan tujuan membicarakan pandangan Islam terhadap berbagai masalah yang menjadi perhatian kaum terpelajar secara ilmiah, misalnya bagaimana hubungan Islam dengan pandangan-dunia, pikiran merdeka, cita-cita persatuan, kebangsaan dan sosialisme serta masalah kedudukan wanita dan perkembangan Islam di luar negeri. Namun pada tahun 1934 salah seorang anggota JIB bernama Yusuf Wibisono melakukan oposisi terhadap PB JIB di bawah pimpinan Kasman Singodimejo karena dinilai telah keluar dari tujuan pendirian JIB dan akhirnya pada saat yang sama bersama Mohammad Roem, Sudiman Kartohadiprojo, Suwahyo, Effendy mendirikan *Studenten Islam Studieclub* (SIS) dengan tujuan: Pertama, mempelajari Islam pada khususnya dan agama lain pada umumnya bukan saja sebagai suatu sistem teologi, melainkan sebagai suatu kebudayaan yang lengkap. Kedua, membangkitkan minat untuk mempelajari Islam kepada golongan cendekiawan khususnya dan kepada lapisan rakyat pada umumnya.³¹ Pada perkembangannya SIS berhasil menghimpun anggota dari mahasiswa Islam baik mereka yang berlatarbelakang keluarga dan memiliki pengetahuan yang cukup tentang Islam dan pada gilirannya merekalah

yang menyumbangkan pengetahuan mereka tentang Islam, seperti Bachrum Rangkuti dan Mohammad Rasjidi serta Mohammad Natsir, maupun mereka yang sadar akan pengetahuan Islam mereka yang terbatas dan tertarik pada segi ruhaniah yang dapat digali dari Islam, seperti Artati Marzuki, Widagdo dan Burhanuddin Harahap.

Dasawarsa tahun 1920-an sampai dengan awal 1930-an dalam sejarah modern Indonesia merupakan “dasawarsa ideologi” saat berbagai pengaruh ideologi terhadap pertumbuhan keagamaan dan perjuangan melawan kekuasaan kolonial dirumuskan dan berbagai strategi perjuangan diperdebatkan.³² Salah satunya adalah perdebatan tentang masalah apa dasar perjuangan bangsa Indonesia melawan kekuasaan kolonial?

Dasar perjuangan melawan kekuasaan kolonial adalah “nasionalisme Indonesia”, kata mereka yang menamakan diri sebagai golongan “kebangsaan”, tapi apa makna nasionalisme itu? Apakah penghormatan kepada “Ibu Pertiwi” itu tidak melampaui ketakwaan kepada Allah? Tanya Haji Agus Salim. Kita tak chauvinis, kata Soekarno, kebangsaan kita bertolak dari harkat kemanusiaan.³³ Salim mengingatkan bahwa jika jiwa nasionalisme tidak mempunyai dasar-dasar agama, maka ia dapat berkembang menjadi ideologi agresif, sebagaimana di Eropa telah menimbulkan ekspansi imperealisme dan kolonialisme. Bagi Agus Salim, Islam tidak menafikan adanya cinta tanah air tetapi yang perlu diperhatikan adalah niat seseorang untuk mencintai tersebut. Teramat penting bagi umat Islam untuk berniat karena Allah semata, sehingga mencintai tanah air pun dibangun atas cinta terhadap Allah, bukan segala benda dan rupa dunia. Karena itu “cinta tanah air, agama,” didasarkan karena Allah ta’ala dan menurut perintah Allah semata-mata. Kritik tersebut dijawab oleh Soekarno dengan membedakan nasionalisme Indonesia dengan nasionalisme Barat.³⁴

Sekitar saat-saat itulah keinginan menggunakan istilah “Indonesia” menguat sebagai nama pengenalan bagi agregat kebangsaan yang sedang tumbuh. Pada tahun 1917, para pelajar dan mahasiswa di Negeri Belanda yang berasal dari kawasan Nusantara menggunakan nama “Indonesia” untuk organisasi mereka, *Indonesisch Verbond van Studerenden*. Ki Hajar Dewantara mendirikan *Indonesisch Persbureau* (kantor berita Indonesia) di Den Haag pada tahun 1918 dan Mohammad Hatta menggunakannya dalam pleidooi “Indonesia Merdeka” (*Indonesie Vrij*) pada Maret 1928 di Belanda. Kemudian nama “Indonesia” dikukuhkan dalam peristiwa yang sangat menentukan bagi sejarah bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dikobarkan lagi oleh Soekarno (1901-1970) dalam

pidato “Indonesia Menggugat” (*Indonesie Klag Aan*), tahun 1930.” Dengan demikian liberalisasi dalam bidang pendidikan telah berhasil melahirkan kelas terdidik baru dan kepemimpinan baru yang mempunyai peran sentral dalam kelahiran dan pertumbuhan awal protonasionalisme yang pada gilirannya menjadi nasionalisme yang lebih sempurna.³⁶

Kelahiran Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh sejak awal menghadapi tantangan kenyataan banyaknya suku, bahasa, dan pola budaya yang sangat beraneka ragam dan terpecah di seluruh pelosok wilayahnya. Hal ini dijawab dengan tekad bersama mengangkat bahasa Melayu logat Riau Kepulauan (dengan Pulau Penyengat sebagai pusat bahasa dan budayanya) sebagai bahasa persatuan.³⁷ Kaum terpelajarlah yang mengambil inisiatif menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa “nasional” Tanah Air Indonesia—dalam lingkup geografis kekuasaan Belanda—sebagai batas-batas wilayah nasionalisme. Demikian pula berbagai suku bangsa di kepulauan Nusantara terikat dengan pengalaman sejarah yang sama sebagai “bangsa Indonesia”.³⁸

Di samping itu kedatangan dan perkembangan Islam di Indonesia tidak hanya menyatukan berbagai kelompok etnis dalam pandangan dunia yang sama, tetapi juga dalam aspek-aspek penting—yang bahkan menjadi dasar nasionalisme—khususnya bahasa. Berkat Islam, bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia, menjadi *lingua franca* berbagai kelompok etnis di Indonesia.³⁹ Dengan penggarapan lebih lanjut oleh para cendekiawan modern dari Sumatera, khususnya Sumatera Barat, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia modern.⁴⁰

C. Nasionalisme di Indonesia pada Masa Penjajahan Jepang

Masa pendudukan Jepang yang singkat (1940-1945) menjadi periode katalis dalam mengakselerasi pertumbuhan nasionalisme di Asia Tenggara. Jepang dengan sengaja mendorong pertumbuhan nasionalisme lokal di Asia Tenggara sebagai bagian kebijaksanaan anti-Baratnya. Dengan demikian, nasionalisme di Asia Tenggara segera memasuki fase kedua yang sangat sarat dengan muatan politis. Tema pokoknya adalah apa yang disebut pemimpin nasionalis, semacam Soekarno, sebagai “*nation and character building*”, yakni memupuk keutuhan dan integritas negara dan bangsa yang akan segera terwujud, sebagaimana dijanjikan Jepang.⁴¹ Dalam konteks ini, pembinaan nasionalisme sesuai dengan kebijakan Jepang, bertujuan mencegah dengan cara apapun kembalinya kolonialisme dan imperialisme Eropa.

Pihak pemerintah militer Jepang menutup semua sekolah dan baru secara berangsur-angsur dibuka kembali. Bahasa Belanda

dilarang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah tipe apapun, sementara untuk menguasai bahasa Jepang butuh waktu, bahasa Indonesia lalu jadi bahasa pengantar pengajaran.⁴²

Bagi para pelajar Indonesia, pengalaman menggunakan bahasa Indonesia dan komunikasi dengan guru-guru Indonesia, dileburnya beragam tipe sekolah (terutama pada level menengah) menjadi sistem yang tunggal, penggunaan seragam sekolah, upacara pagi dan baris-berbaris, dan praktek para militer lainnya membangkitkan rasa solidaritas kolektif baru yang memperkuat nasionalisme Indonesia.⁴³

Dua hari setelah pasukan Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Mohammad Hatta menyatakan kemerdekaannya. Sebuah bangsa baru lahir ke dunia, bangsa Indonesia yang tidak mendasarkan eksistensinya pada rasialisme, etnisisme, sektarianisme dan lain-lain pertimbangan eksklusif, tetapi kepada cita-cita bersama menciptakan maslahat umum dan kesejahteraan sosial.⁴⁴ Dalam bahasa Arab, bangsa sering diungkapkan dengan istilah *ummatun*, seperti "United Nations", "Perserikatan Bangsa-Bangsa" terjemahnya dalam bahasa Arab ialah "*al-Umam al-Muttahidah*", "Umat-umat Bersatu". Jadi "negara bangsa" adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.⁴⁵ Tujuannya ialah mewujudkan maslahat umum. Korelasi langsungnya adalah bentuk pemerintahan republik dan demokrasi, egaliter, partisipasi terhadap negara itu terbuka dan tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan golongan seperti antara bangsawan dan bukan bangsawan, ataupun perbedaan secara horizontal antar-suku.⁴⁶

Islam mempunyai pengaruh khusus terhadap nasionalisme Indonesia karena ia merupakan penggerak utama dan bagian essensial yang permanen, bahkan peranan Islam tampaknya merupakan salah satu bentuk modernisasi dan kaum muslim modernis menjadi kekuatan sosial-politik yang penting dalam nasionalisme Indonesia.⁴⁷ Hal ini pun dapat ditemukan pada organisasi Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan Himpunan Mahasiswa Islam (1947) yang sangat konsen terhadap cita-cita Indonesia sebagai sebuah negara bangsa.⁴⁸ Jadi, tegasnya dan singkatnya, ummat Islam berhasil menjalankan fungsinya sebagai pangkal tolak dan pengembang kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, dan perlawanan kepada penjajah.⁴⁹

Selama lebih dari empat tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan melalui

perjuangan revolusi kemerdekaan karena Belanda berusaha berkuasa kembali atas Indonesia. Kolonialisme ingin dilanjutkan setelah Perang Dunia II. Para pemimpin Indonesia menghadapi benturan tembok logika diplomasi internasional bahwa Indonesia adalah milik pihak yang kalah, yaitu Jepang, karena itu harus diserahkan kembali kepada pihak pemenang, yaitu Sekutu, sebagai "harta rampasan perang". Reaksi terhadap ambisi kolonial Belanda ini dikenal dalam sejarah Indonesia modern sebagai perang kemerdekaan sampai pihak penjajah mengakui kedaulatan Indonesia pada akhir 1949.

Konferensi Meja Bundar di Den Haag dari 23 Agustus hingga 2 Nopember 1949 akhirnya menyerahkan tanpa syarat sebelum 30 Desember 1949, kedaulatan Belanda atas semua wilayah bekas Hindia, kecuali Papua, kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dan Perdana Menteri RIS (1949-1950). RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara-negara bagian bentukan Belanda. Investasi-investasi Belanda dilindungi, dan pemerintahan baru berkewajiban melunasi utang jutaan dolar pemerintah kolonial Hindia.

Sejak September 1950 sampai dengan Maret 1957, Indonesia melakukan eksperimen politik demokrasi parlementer (konstitusional) yang telah menimbulkan berbagai masalah nasional: ekonomi pasca-revolusi kemerdekaan merosot, kabinet terus berganti-ganti, masing-masing bertahan tidak lebih dari dua tahun. Lebih buruk lagi, karena saat itu partai-partai politik cenderung berorientasi kepentingan jangka pendek, penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan kronisme menjadi pemandangan lazim.⁵⁰ Di lima belas negara bentukan Belanda, muncul tuntutan umum untuk meleburkan diri ke dalam Republik Indonesia. Pada 3 April 1950, Mohammad Natsir, Ketua Fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RIS, mengajukan Mosi Integral Natsir kepada DPR, yang menuntut agar semua negara bagian itu bersatu dan melebur ke dalam negara kesatuan yang mendapatkan respons positif dari parlemen. Pada hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan Indonesia kelima 17 Agustus 1950, RIS digantikan oleh Republik Indonesia dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sebegitu jauh, penampilan terbaik "demokrasi liberal" parlementer itu adalah pada saat pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, seorang tokoh Masyumi pengikut M. Natsir, yang pada tahun 1955 berhasil melaksanakan Pemilu pertama dalam sejarah RI⁵¹

Hasil Pemilu 1955 ternyata tidak memuaskan pihak manapun, terutama Masyumi dan PNI, yang sebelumnya berpengharapan besar akan menang. Tidak ada perolehan suara terbanyak mutlak. Segera

setelah Pemilu itu, kabinet Ali-Roem-Idham (PNI-Masyumi-NU) dibentuk. Meskipun kabinet ini disokong sangat kuat dalam parlemen, tapi ternyata kabinet ini pun tidak berumur panjang (Maret 1956-Maret 1957).⁵² Sebabnya karena Masyumi dan partai-partai lain dalam kabinet sering benar tidak sependapat dalam menghadapi isu-isu politik penting dan sikap oposisi Presiden Soekarno sejak dari awal pembentukannya.

Rapuhnya demokrasi parlementer menjadi dalih bagi Presiden Soekarno untuk mengumumkan dekrit kembali ke UUD 45, pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu disusul dengan pidato kenegaraan 17 Agustus 1959, berjudul "Menemukan Kembali Revolusi Kita", yang menegaskan bahwa pemerintah Indonesia kembali ke sistem presidensial dari sistem parlementer dan Presiden Soekarno bertindak sebagai kepala pemerintahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa agar pembangunan nasional dapat dijalankan dengan mantap.

Pengumuman dekrit tersebut menandai runtuhnya seluruh bangunan demokrasi konstitusional dan dimulainya pemberlakuan penuh "Demokrasi Terpimpin" yang totalitarian. Secara institusional, sejak 9 Juli 1959 Soekarno mengangkat dirinya sebagai perdana menteri dari kabinet-kabinet Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sampai tahun 1966.

Umat Islam Indonesia baik pihak modernis maupun kaum pesantren tradisional, secara umum dapat dikatakan bahwa sejak awal telah memilih sistem politik demokrasi. Menurut pandangan mereka, demokrasi adalah mekanisme politik yang lebih baik yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita politik Islam. Golongan modernis khususnya adalah pembela-pembela demokrasi yang tangguh dalam menentang gerakan politik otoriter Soekarno.⁵³ Beberapa partai politik yang dipersatukan oleh platform demokrasi modern, yaitu Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Parkindo dan Partai Katolik, didukung beberapa pribadi tokoh kalangan NU dan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan restu Bung Hatta, membentuk gerakan "Liga Demokrasi" guna menggalang kekuatan politik melawan Soekarno.⁵⁴

Pada masa akhir Demokrasi Terpimpin, rakyat merasa kehilangan kebebasan sipilnya, dan ekonomi Indonesia merosot sampai hampir membangkrutkan negara, maka setelah berjalan lima atau enam tahun, sistem otoriter ini hancur secara dramatis, Bung Karno pada tahun 1965 jatuh *in disgrace* bersama pihak komunis yang mendukungnya.⁵⁵

D. Nasionalisme Indonesia pada Masa Pembangunan

Menyusul Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, seluruh oposisi hancur dengan dibubarkannya Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi afliasinya. Rezim kekuasaan baru yang tengah bangkit menyebut periode “Demokrasi Terpimpin” era Soekarno sebagai “Orde Lama” dan merayakan era baru kekuasaannya sebagai “Orde baru”.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh pemerintah Orba ketika mulai memegang tampuk kekuasaan, adalah mengatasi birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan kekuasaan otoriter warisan rezim lama, yang dianggap telah membawa kemerosotan ekonomi rakyat.⁵⁶ Dalam menghadapi hal itu, Orba tiba pada kesimpulan bahwa mobilisasi politik massa dan pertikaian para politisi sipil telah menelantarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, oleh karena itu perhatian rakyat harus dialihkan dari wawasan “politik sebagai panglima” seperti yang dipraktikkan selama Orla, kepada “ekonomi sebagai panglima”.⁵⁷

Peristiwa penting yang langsung mempengaruhi ide pembangunan ekonomi Orba adalah kebutuhan mencetak ahli-ahli ekonomi sendiri yang didukung oleh kelompok militer Angkatan Darat (AD) yang menjadi lawan komunis. Dalam rangka itu, pendidikan SESKOAD melibatkan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu ekonomi kepada para perwira tinggi AD, salah seorang dari mereka adalah Mayor Jenderal Soeharto yang kemudian menjadi Presiden RI.⁵⁸

Lima tokoh Fakultas Ekonomi UI diundang menjadi tim penasehat ekonomi Jenderal Soeharto. Mereka mencanangkan konsep “pembangunan” dengan penekanan kuat pada pola atau model pembangunan negara-negara Barat: pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Mereka bertugas meningkatkan stabilisasi, rehabilitasi dan pembangunan.⁵⁹ Para teknokrat yang terdidik secara akademis itu menambah kredibilitas pemerintahan Soeharto di mata negara-negara Barat. Mereka dikenal dengan “mafia Berkeley” karena beberapa diantara mereka lulusan Universitas Berkeley.

Kebijakan birokrasi terpenting Orba adalah komitmennya terhadap modernisasi yang sengaja dirancang untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi politik rakyat dan menjadi kebijakan strategis untuk menarik dukungan negara-negara Barat atau investor asing agar memberikan bantuan bagi pelaksanaan pembangunan pada masa-masa awal Orba.⁶⁰

Sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang diberikan negara-negara Barat, pemerintah Orba mengadopsi langkah-langkah reformasi yang terus-menerus dipuji oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Langkah-langkah itu mendominasi kebijakan ekonomi pada tahun 1970-an.⁶¹ Dengan kebijakan seperti itu, Orba berhasil membangun birokrasi yang kuat dan berporos pada hubungan militer dengan sipil yang erat, bahkan Orba melebarkan fungsi birokrasinya menjadi mesin politik yang tangguh dalam merekayasa kehidupan sosial-politik masyarakat untuk mempertahankan status quo maupun melaksanakan suksesi terencana di antara jaringan kekuasaan yang mengitarinya.⁶²

Dalam bidang politik, pemerintahan Orba di Indonesia juga telah berhasil menata konstruksi lembaga-lembaga politik secara struktural, sehingga di satu sisi semua lembaga-lembaga politik ditata sejalan dengan konstitusi dan di sisi lain partisipasi politik masyarakat diarahkan pada saluran-saluran politik formal. Hasilnya adalah stabilitas politik yang terjaga selama lebih dari dua puluh tahun.⁶³ Namun stabilitas politik berjalan dengan kesenjangan distribusi kekuasaan yang berimplikasi luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat karena hak-hak politik mereka kurang dihargai. Akibatnya pengawasan terhadap kekuasaan tidak dapat berkembang.

Orba saat berkuasa menghadapi berbagai aktivitas gerakan organisasi masyarakat Islam dengan dua strategi. Pertama mengkooptasi dan membujuk para pemuka organisasi masyarakat Islam bergabung dengan partai berkuasa, Golkar. Kedua mendeskreditkan mereka dengan cara menghubungkan-hubungkan mereka dengan ekstrimisme dan terorisme serta mengancam dan menganiyaya mereka. Menurut Andres Uhlin, penguasa Orba pada tahun 1990-an banyak menggunakan strategi kooptasi, seperti terlihat saat pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Desember 1990.⁶⁴ Intelektual-intelektual Muslim M. Dawam Rahardjo, Nurcholish Madjid dan Imaduddin Abdulrahim serta Amien Rais dan Adi Sasono dilibatkan dalam pembentukan ICMI. Mereka ingin menyatukan intelegensia Muslim yang terpecah-pecah dan terpinggirkan kedalam sebuah kelompok penekan politis. Akan tetapi, pemerintah telah betul-betul berhasil dalam mencoba mengarahkan ICMI kedalam sebuah etalase kerja sama antar Islam dan pemerintahan Soeharto. Menteri Riset dan Teknologi, B. J. Habibie terpilih menjadi ketua dan terdapat beberapa menteri negara dan banyak birokrat didalam kepemimpinan organisasi ini. Anggota ICMI dapat dibagi kedalam tiga kelompok : birokrat pemerintah;

teolog dan ilmuwan muslim; serta aktivis dan politisi Islam. Kelompok birokrat sejauh ini merupakan kelompok yang paling berpengaruh, tetapi kelompok aktivis dan politisi tidak terlalu tidak signifikan. Mereka memiliki dua tujuan: a) Islamisasi Indonesia, dan b) demokratisasi dan demiliterisasi.

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosio-politik yang ideal. Larry Bermann dan Bruce Allen Murphy dalam buku *Approaching Democracy* menyebutkan bahwa sampai akhir tahun 1996 tidak kurang 118 negara dari 191 negara di dunia ini yang mendambakan sistem pemerintahan demokrasi dan tercatat antara 1974 hingga 1992 ada 30 negara yang mengalami proses transisi ke demokrasi. Namun demikian para pengamat tidak memasukkan di dalamnya sebagian besar dunia Islam.⁶⁵

Para ahli seperti Larry Dimond, Juanz Linz, dan Seymour Martin Lipset berpendapat bahwa kebanyakan negara-negara Islam tak dapat diharapkan melakukan proses transisi ke demokrasi, bahkan Samuel P. Huntington menandaskan bahwa, “*confucion democracy is clearly contradiction in terms. It is unclear whether ‘Islamic democracy’ is.*”⁶⁶ Tesis Huntington tentang benturan budaya ini jika dibandingkan dengan pernyataan Robert N. Bellah adalah tesis ilmiah palsu.⁶⁷ Karena sebagaimana Bellah telah simpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan Nabi Muhammad saw di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Masyarakat Madinah pada masa klasik Islam itu yang terlihat dalam berbagai keteladanan Muhammad saw dan *al-Khulafa al-Rashidun* menyerupai benar gambaran sebuah masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis seperti dalam konsep-konsep sosial politik modern⁶⁸

Secara konstitusional syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah. 1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; 3. Pemilu yang bebas; 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat; 5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; 6. Pendidikan kewarganegaraan.⁶⁹

Berdasarkan syarat-syarat dasar itu, pemerintahan Soeharto kurang menghayati berbagai keharusan sebuah *modern nation state*, yaitu keharusan menerapkan prinsip-prinsip: *good governance* untuk menghasilkan *clean government* (sehingga praktek-praktek KKN yang sangat terkutuk itu dapat tercegah), melindungi kebebasan sipil,

membela hak asasi manusia, menegakkan kedaulatan hukum, memperhatikan pendidikan untuk seluruh warga negara di semua pelosok wilayah dengan sungguh-sungguh, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁷⁰

Pelaksanaan pembangunan Orba oleh Soeharto itu menunjukkan pembangunan ekonomi saja, padahal perkembangan pengertian *modern nation state* atau nasionalisme modern yang tidak hanya bertujuan melaksanakan pembangunan ekonomi saja, tapi seperti tahap perkembangan nasionalisme yang dikemukakan oleh Organsky, nasionalisme itu mengarah kepada pencapaian politik kesejahteraan dan kemakmuran.⁷¹

Bekerjanya sebuah sistem demokratis sangat bergantung pada tingkat kesalingpercayaan yang dibangun di dalamnya. Pada tingkat negara ada kesalingpercayaan antara pemerintah dan rakyat; di antara elemen-elemen pemerintah sendiri (eksekutif, legislatif, yudikatif); demikian pula di antara elemen-elemen masyarakat sipil. Hanya bangsa yang memiliki tradisi sebagai "*high trust society*" yang akan mampu membangun institusi politik dan ekonomi yang besar dan bertahan lama. Tetapi mereka yang tergolong "*low trust society*"—atau bahkan ada yang tergolong "*zero trust society*"?—sulit untuk mengembangkan diri karena ongkos sosialnya sangat mahal disamping sikap untuk sulit saling percaya dan memang tidak layak dipercayakan menggerogoti eksistensi sebuah bangsa sehingga akan tenggelam, bahkan tergilas, alam percaturan global.⁷² Namun Francis Fukuyama (1996) menegaskan bahwa kepercayaan sangat ditentukan oleh budaya. Kepercayaan adalah ekspektasi yang tumbuh dalam komunitas dengan perilaku regular, jujur dan kooperatif, berdasarkan norma-norma yang dihormati bersama. Jika kultur yang diperlukan untuk membangun kepercayaan tak mendukung, misalnya kultur korupsi, nepotisme, kekerasan dan pemaksaan, fondasi kepercayaan dalam sistem demokrasi akan rapuh.⁷³

Mengingat wawasan kebangsaan bermuatan nilai-nilai dan cara pandang terhadap dunia sekitarnya, sesungguhnya kita telah memiliki "*social capital*" yang sangat berharga, yang terdapat pada budaya dan agama, dan secara substansial, Pancasila telah merepresentasikan nilai dan visi yang sangat mendasar yang masih sangat relevan untuk acuan pengembangan SDM di masa depan, tapi pengalaman selama ini menunjukkan, semua nilai-nilai itu sulit berkembang kalau tidak dilindungi oleh sebuah pranata dan mekanisme politik-ekonomi yang demokratis dan akuntabel. Dalam bahasa manajemen, sebuah masyarakat, lebih sempit lagi di lingkungan perusahaan ataupun departemen pemerintahan, akan maju dan bertahan kalau tumbuh

beberapa prinsip, antara lain *integrity*, *competency (skill)*, *commitment*, *continuous learning*, dan *visionary*. Perpaduan antara integritas dan kompetensi sangat vital untuk membangun kultur yang sehat, yang selama ini keduanya tampak berjalan sendiri-sendiri. Lebih parah lagi kalau mereka yang menduduki posisi penting dalam partai dan lembaga tinggi pemerintah tidak memiliki kedua kualitas dimaksud. Maka di situ diperlukan prinsip *continuous learning* dan *commitment* karena tantangan dan perubahan sosial berjalan begitu cepat sehingga jika kita berhenti belajar pasti akan kehilangan kompetensi.⁷⁴

E. Penutup

Sejalan dengan tuntutan dan perkembangan zaman, paham nasionalisme atau kebangsaan menghadapi tantangan. Dalam kurun waktu 20 tahun pertama sejak bangsa Indonesia merdeka, paham kebangsaan menghadapi tantangan dari demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin yang membuka ruang bagi tumbuhnya aspirasi separatis yang disebabkan oleh karena ketidakpuasan daerah terhadap kepemimpinan politik di Jakarta ketika itu. Akibatnya tujuan terbentuknya bangsa dan negara sejak awal untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur terabaikan oleh proses tersebut.

Perbedaan kepentingan, orientasi, dan ideologi menjadi faktor yang menyebabkan kesepakatan-kesepakatan sulit dicapai telah menjadi problem nasionalisme bangsa pada era reformasi saat ini.

Catatan akhir:

¹ Andrik Purwasito, *Imajeri India, Studi Tanda dan Wacana*, (Surakarta, Pustaka Cakra, 2002), 407.

² Taufik Abdullah, "Pengantar", dalam Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara*, iii-iv.

³ Taufik Abdullah, "Pengantar", dalam Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara*, vi-vii.

⁴ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban "Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan"* (Jakarta, Universitas Paramadina, Cetakan V, Agustus 2005), lxiv.

⁵ Benedict Anderson, *Imagined Communities*, 117.

⁶ Liah Green and Jonathan Eastwood, "Nationalism in Comparative Perspective", Thomas Janoski and others, eds. *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization* (UK, Cambridge University, 2005), 248.

⁷ Benedict Anderson, *Imagined Communities*, 74.

⁸ Facy Ali, "Kesetaraan Wacana Demokrasi dan Wawasan Nasional", dalam Bambang Pranowo dan Darmawan, ed. *Reorientasi Wawasan Kebangsaan di Era Demokrasi* (Yogyakarta, Aditya Karya Nusa, Cetakan pertama, Januari 2003), 10.

⁹ Walker Connor, *Ethnonationalism The Quest for Understanding* (New Jersey, Princeton University Press, Fifth Published, 1994), 71.

¹⁰ Azyumardi Azra, "Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Asia Tenggara", dalam *Renai-sans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua, Mei 2000), 105-112.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, lv-lvi.

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia* (Jakarta, Prenada Media, Cetakan ke-2, Oktober 2005), 12. Lebih lanjut dalam buku ini Azra menjelaskan berdasarkan pada data sejarah lokal dalam literatur sejarah Melayu-Indonesia, AH. Johns menyatakan kecilnya kemungkinan para pedagang muslim memainkan peranan terpenting dalam penyebaran Islam di kawasan Nusantara, melainkan para sufi pengembaralah yang terutama berdakwah Islam di sana. Menurut Johns, banyak sumber lokal yang mengaitkan pengenalan Islam ke kawasan ini dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang kental. Sebagian mereka dapat mengawini putri-putri bangsawan dan memberikan kepada anak-anak mereka gengsi darah bangsawan dan sekaligus aura keilahian atau karisma keagamaan. Setelah Baghdad jatuh ke tangan laskar Mongol pada 656 H/1258 M, kaum sufi memainkan peran kian penting dalam memelihara keutuhan Dunia Muslim dengan menghadapi tantangan pengepungan kawasan-kawasan kekhalifan dalam wilayah-wilayah linguistik Arab, Persia dan Turki. Secara bertahap, tarekat sufi menjadi institusi yang stabil dan disiplin serta mengembangkan afiliasi dengan kelompok-kelompok dagang dan kerajinan tangan yang ikut membentuk masyarakat urban.

¹³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 14. Menurutnya dalam buku ini orang Arab menamakan Semenanjung Iberia di Eropa Barat Daya secara keseluruhan sebagai Andalusia yang selama lima sampai tujuh abad berada di bawah kekuasaan Islam. Kaum muslim berhasil membangun Andalusia menjadi pusat peradaban dunia, khususnya untuk wilayah Barat (*Al-Maghrib*).

¹⁴ Andi Faisal Bakti, *Nation Building*, xxi.

¹⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta, LP3ES, Cetakan kedelapan, Mei 1996), 26.

¹⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta, LP3ES, Cetakan Pertama, Februari 1985), 52. Lihat juga Harry J. Benda, *Continuity and Change in Southeast Asia*, (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972), 83.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, 359-360.

¹⁸ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta, LP3ES, Cetakan Kedua, Mei 1996), 234-235.

¹⁹ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 86.

²⁰ Atas dasar pasal 6 Garis-Garis Besar Pelaksanaan Hukum untuk Hindia yang dikeluarkan tahun 1848: Penduduk Hindia diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang berbeda. *Pertama*, orang-orang Eropa dan yang secara resmi diperlakukan setara dengan orang-orang Eropa-yaitu semua orang pribumi (Boemipoetra) yang beragama Kristen. *Kedua*, kaum Boemipoetra dan mereka yang diperlakukan setara dengan kaum Boemipoetra, yaitu orang-orang Arab, Moor, Cina, dan semua penganut Muslim serta penganut agama lainnya. Dalam praktiknya, klasifikasi ini menjadi lebih rumit lagi. Terdapat beberapa sub-stratum untuk setiap kategori social. Dalam kelompok kategori yang secara teoritis dianggap sebagai

setara dengan orang Eropa, masih ada tingkatan-tingkatan hierarki yaitu mereka yang berdarah Eropa murni berada di tingkatan teratas, orang-orang Eurasia (*Indo*) berada di tengah, dan kaum pribumi beragama Kristen di lapis bawah. Situasi yang sama juga berlaku pada kelompok kategori Boemipoetra sesuai dengan kedekatan individu pada symbol-simbol kekuasaan dan otoritas politik. Hierarki itu berkisar dari mkaum terpendang (priyayi kelas atas, bangsawan); para pegawai pada keluarga-keluarga Eropa dan Boemipoetra yang terkemuka; kemudian priyayi-priyayi kecil ataupun para pegawai pemerintah yang rendahan dan keluarga-keluarga kaya, dan yang terakhir para petani kecil, pedagang kecil, dan orang-orang biasa lainnya. Seperti dikutip oleh Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 89.

²¹ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 90.

²² Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional, Jilid II* (Jakarta, Gramedia, Cetakan I, 1993), 32.

²³ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 82.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 29-31.

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, 57.

²⁶ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa Risalah Cendekiawan Muslim* (Bandung, Mizan, Cetakan IV, Maret, 1999), 66. Lebih lanjut dia menguraikan arti intelektual baik sebagai golongan terpelajar sekolahan atau bukan (termasuk yang *drop out*) yang berperan dalam masyarakat tidak harus berkaitan dengan ilmu yang dipelajari atau profesi yang dikuasai, mereka berperan sebagai kritikus sosial, bersikap emansipatoris atau liberatif, berpola pikir hermeneutis dan bersikap politis, meskipun belum pasti mereka politikus. Bandingkan dengan Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 16, menyatakan bahwa arti "intelektual" dan "intelegensia" dapat dilartikan dengan 2 pendekatan yaitu pertama pendekatan formalistik yang dipegang orang Eropa Barat dan Amerika, mereka mengidentikkan intelegensia dengan intelektual menunjuk pada seorang individu atau kelompok individu yang berurusan dengan dunia ide-ide, dan menjalankan peran sosialnya sebagai para pemikir ide-ide, kedua pendekatan hitsoris yang diusung sejarawan Eropa Timur mengartikannya sebagai sebuah fenomena yang unik dan partikular. Keduanya tidak dapat dipertukarkan karena masing-masing memiliki perjalanan historis dan konsekuensi-konsekuensi sosialnya sendiri-sendiri.

²⁷Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, 20-21. Dalam uraian tentang politik etis, Abdullah mencatat bahwa kebijakan itu secara historis berhubungan pula dengan saran yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje tentang "politik Islam" terhadap pemerintah kolonial. Snouck mengidentifikasi pola perbuatan keagamaan Islam dengan membedakan antara "ibadah", "perbuatan sosial" dan "politik" sebagai alat dalam merumuskan politik Islamnya. Menurutny yang pertama "jika perlu dibantu", dan yang kedua "jangan dihalangi", tetapi yang ketiga, "politik", harus disikat habis. Karena Islam bagi rakyat Indonesia telah menjadi simbol dari "kebangsaan", maka ketika anak negeri merasa haknya telah diinjak misalnya, mereka akan menemukan pemecahan dalam ajaran Islam, mereka akan bergerak, berbuat dan memberontak di bawah panji-panji Islam. Jadi menurut Abdullah politik etis pemerintah kolonial bertujuan pula melahirkan pemimpin masyarakat alternatif yang dapat menggantikan peran yang selama ini dijalankan oleh para ulama ditengah masyarakat.

²⁸ Hilman Farid, "Menemukan Bangsa, Mencipta Bahasa: Bahasa, Politik, dan Nasionalisme Indonesia," dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim, ed. *Bahasa dan Kekuasaan*, 109.

²⁹ Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa* (Bandung, Mizan, Cetakan I, September 2001), 21.

³⁰ M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, 43. Hal ini sama dengan yang ditulis oleh Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat*, 1-6, bahwa dilihat dari pengakuan hukum yang diberikan oleh pemerintah penjajah Belanda kepada masing-masing cabang SI, bukan kepada organisasi SI secara keseluruhan, maka sejak berdirinya SI dapat dianggap sebagai awal dari sejarah Partai Politik Islam di Indonesia. Sedangkan menurut catatan Deliar Noer SI mulai menjalankan sikap politik nonkooperatif terhadap pemerintahan Belanda tepatnya pada tahun 1924. Dalam tulisannya ini Deliar Noer juga mencatat bahwa setelah tahun 1936 dengan wafatnya Tjokroaminoto, H. Agus Salim pun kemudian dipecah dari SI dan sejak saat itu peranan SI dalam politik di Indonesia semakin surut. Lihat Deliar Noer, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, 289.

³¹ M. Dawam Rahardjo, "Peranan Kaum Terpelajar Muslim dan Sejarah," dalam *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, 49-51.

³² Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, 15.

³³ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, 15.

³⁴ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta, Teraju, Cetakan I, 2002), 67.

³⁵ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 35.

³⁶ Azyumardi Azra, *Renaissans Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, 109.

³⁷ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 37.

³⁸ Azyumardi Azra, "Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Asia Tenggara", dalam *Renaissans Islam Asia Tenggara*, 109.

³⁹ Azyumardi Azra, "Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Asia Tenggara", dalam *Renaissans Islam Asia Tenggara*, 109.

⁴⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 38.

⁴¹ Azyumardi Azra, "Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Asia Tenggara", dalam *Renaissans Islam Asia Tenggara*, 109.

⁴² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 331.

⁴³ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 331.

⁴⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 36.

⁴⁵ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 43.

⁴⁶ Nurcholish Madjid, "Justru yang Saya Lakukan, Itulah yang Dikehendaki Natsir", Wawancara *Majalah Panjimas*, Juni 2003 No. 13 Tahun I, dalam Ahmad Gaus AF dan Yayan Hendrayani, ed. *Begawan Jadi Presiden Cak Nur Menuju Istana* (Jakarta, KPP Kelompok Paramadina, Cetakan I, Agustus 2003), 207.

⁴⁷ Andi Faisal Bakti, *Nation Building*, xxvi-xxvii.

⁴⁸ Komaruddin Hidayat, "Nasionalisme Religius: Kesadaran Sesaat" dalam *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernisme* (Jakarta, Paramadina, Cetakan Pertama, September 1988), 51.

⁴⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, lxxv.

⁵⁰ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 358.

⁵¹ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 90.

-
- ⁵² Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, 123.
- ⁵³ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, 126.
- ⁵⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 92.
- ⁵⁵ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 92.
- ⁵⁶ M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Jakarta, Paramadina, Cetakan I, Desember 1995), 17.
- ⁵⁷ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, 453.
- ⁵⁸ Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Oede Baru* (Bandung, Mizan, Cetakan I, April 1986), 104.
- ⁵⁹ Bruce Glassburner, "Indonesia's New Economic Policy and Its Sociopolitical Implications", in Karl D. Jackson and Lucian W. Pye, eds., *Political Power and Communications in Indonesia* (Berkeley, University of California Press, First Edition, 1980), 138. Lima orang ahli ekonomi tersebut adalah Prof. Widjojo Nitisastro, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, Emil Salim, dan Subroto.
- ⁶⁰ M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, 19.
- ⁶¹ MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, , 603.
- ⁶² M.Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*, 18.
- ⁶³ Eep Saefulloh Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi*, 122.
- ⁶⁴ Andres Uhlin, *Oposisi Berserak*, 70-71.
- ⁶⁵ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara , dan Demokrasi*, Yogyakarta, Galang Press, 101-102.
- ⁶⁶ Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, dalam Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam*, 101.
- ⁶⁷ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 176.
- ⁶⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 114-115.
- ⁶⁹ Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, 43.
- ⁷⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, 95-96.
- ⁷¹ Adhyaksa Dault, *Islam dan Nasionalisme Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, Cetakan I, 2005), 99. Organsky membagi tahap perkembangan nasionalisme menjadi empat. *Pertama*, tahap perkembangan politik kesatuan nasional primitif. *Kedua*, tahap perkembangan politik industrialisasi. *Ketiga*, tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional; dan *keempat*, tahap perkembangan politik kemakmuran.
- ⁷² Yasraf Amir Piliang, "Ruang Hampa Demokrasi", *Harian Umum Kompas*, Kamis, 7 April, 2011, 6.
- ⁷³ Yasraf Amir Piliang, "Ruang Hampa Demokrasi", 6.
- ⁷⁴ Komaruddin Hidayat, "Pengembangan SDM yang Berwawasan Kebangsaan untuk Memperkuat Ketahanan Nasional", 180.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta, LP3ES, Cetakan Kedua, Mei 1996.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, Cetakan ke-2, 2005.
- , "Nasionalisme, Etnisitas, dan Agama di Asia Tenggara", dalam *Renaissance Islam Asia Tenggara Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cetakan kedua, Mei 2000.
- Benda, Harry J. *Continuity and Change in Southeast Asia*, New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972.
- Connor, Walker, *Ethnonationalism The Quest for Understanding*, New Jersey: Princeton University Press, Fifth Published, 1994.
- Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme Reposisi Wacana Universal dalam Konteks Nasional*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cetakan I, 2005.
- Green, Liah and Jonathan Eastwood, "Nationalism in Comparative Perspective", Thomas Janoski and others, eds. *The Handbook of Political Sociology States, Civil Societies, and Globalization*, UK: Cambridge University, 2005.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama, Februari 1985.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban "Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan"*, Jakarta: Universitas Paramadina, Cetakan V, Agustus 2005.
- Noer, Deliar, *Membincangkan Tokoh-Tokoh Bangsa*, Bandung: Mizan, Cetakan I, September 2001.